

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penopang stabilitas ekonomi domestik, tetapi juga menjadi penyedia lapangan kerja terbesar serta sarana pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah (OJK, 2025). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM pada tahun 2025 mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha. Keberadaan UMKM tersebut menyumbang sebesar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 199 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (ANTARA, 2025). Data ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dan kinerja UMKM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun besarnya kontribusi UMKM tersebut tidak selalu sejalan dengan kualitas pengelolaan internal usaha, khususnya dalam aspek keuangan.

Meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tergolong besar, tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM terletak pada rendahnya pengelolaan keuangan yang memadai. Munculnya permasalahan penting ini telah disoroti dalam artikel [metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com), yaitu banyak

pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti mencampur dana pribadi dan bisnis, tidak mencatat transaksi secara rutin, serta kesulitan memantau arus kas harian (metrotvnews.com, 2026).

Permasalahan pengelolaan keuangan UMKM juga diperkuat oleh temuan empiris (Mali, 2023) yang menunjukkan bahwa kecenderungan pelaku usaha yang belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha, minimnya pencatatan transaksi, serta belum tersusunnya laporan keuangan formal secara sistematis. pengelolaan keuangan yang kurang baik sejak awal berpotensi menimbulkan ketidakbertanggungjawaban individu terhadap keuangannya dan menghambat keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Leunupun, Kriswantini, & Madiuw, 2022).

Menurut (Perry & Morris, 2005) pengelolaan keuangan adalah kecenderungan seseorang dalam merencanakan, menyimpan, dan mengendalikan pengeluaran keuangan. Ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam mengatur arus kas usaha, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menentukan prioritas penggunaan dana agar kegiatan operasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu faktor yang diindikasikan memengaruhi pengelolaan keuangan pada UMKM adalah literasi keuangan mereka. (Chen & Volpe, 1998) mendefinisikan literasi keuangan adalah pengetahuan untuk mengelola keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi, yang membantu individu mengambil keputusan finansial yang

tepat untuk masa depan. Tingkat literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan terencana. (Nurlela, Zulaiha, & Dimyati, 2025) menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman literasi keuangan serta cara pandang terhadap risiko berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan finansial pelaku UMKM.

Secara makro, kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Tingkat inklusi keuangan tercatat sebesar 85,10%, sementara tingkat literasi keuangan baru mencapai 49,68% (OJK, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat, termasuk pelaku UMKM, lebih banyak memanfaatkan produk dan layanan keuangan dibandingkan memahami konsep dan prinsip pengelolaan keuangan yang tepat, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pengambilan keputusan finansial yang kurang bijak dan lebih rentan terhadap risiko keuangan, khususnya pada pelaku UMKM di daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti menetapkan literasi keuangan sebagai variabel (X) yang diduga memiliki peran penting dalam memengaruhi pengelolaan keuangan sebagai variabel terikat (Y). Pemilihan variabel literasi keuangan didasarkan pada relevansinya terhadap

permasalahan pengelolaan keuangan UMKM serta dukungan dari temuan empiris yang menunjukkan adanya keterikatan antara kedua variabel tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi keuangan berpotensi memengaruhi pengelolaan keuangan UMKM, namun hasil temuan empirisnya masih belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh (Santiara & Sinarwati, 2023) di Kecamatan Tejakula menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Marcela, 2024) pada UMKM sektor kuliner di Palembang menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, sektor usaha, dan kondisi sosial ekonomi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menguji kembali pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM pada konteks wilayah yang berbeda, yaitu Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, yang memiliki karakteristik sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih kontekstual serta menjadi pembadingan bagi hasil penelitian sebelumnya.

UMKM di Kabupaten Tabalong terus berkembang dari tahun ke tahun sehingga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dilihat dari

data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 terdapat jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong adalah 19.124 unit, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 18.890. Adapun jumlah UMKM yang aktif berdasarkan binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) sebagai berikut:

Table 1.1 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Tabalong binaan PLUT KUMKM per Kecamatan Tahun 2023 – 2025

Kecamatan	2023	2024	2025	Jumlah
Banua Lawas	3	0	1	4
Bintang Ara	1	4	0	5
Haruai	10	18	4	32
Jaro	4	3	0	7
Kelua	21	11	5	37
Muara Harus	4	9	4	17
Muara Uya	4	4	6	14
Murung Pudak	112	122	59	293
Pugaan	7	1	0	8
Tanjung	74	30	19	123
Tanta	15	20	9	44
Upau	11	12	0	23

Sumber : PLUT KUMKM Kab. Tabalong, diolah penulis 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2023-2025 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong memiliki jumlah UMKM sebanyak 123 UMKM, yang tersebar diberbagai sektor seperti kuliner, fashion, kerajinan, dan jasa. PLUT KUMKM sendiri telah memberikan beberapa program yang berkaitan dengan literasi keuangan diantaranya

adalah pengelolaan keuangan dasar, pembuatan laporan keuangan, pelatihan serta bimbingan mengenai usaha dan membantu perizinan usaha.

Peneliti memilih Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sebagai lokasi penelitian karena kedudukannya yang strategis sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Tabalong. sebagai pusat administratif, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong menjadi barometer perkembangan ekonomi dan titik pusat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam membina UMKM. Selain itu, keberagaman jenis UMKM di wilayah ini dinilai mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tantangan dan potensi seluruh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tabalong. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja. Mengingat peran vital tersebut, maka pengelolaan keuangan yang baik menjadi syarat mutlak agar UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dapat terus berkembang dan berkontribusi secara berkelanjutan terhadap ekonomi Kabupaten Tabalong.

Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pada UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademis serta rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?
2. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
2. Untuk menguji besarnya pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu khususnya di bidang literasi keuangan pada pengelolaan keuangan UMKM, serta menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan dalam mengelola usaha secara efektif. Informasi ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memecahkan dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan.

b) Bagi STIA Tabalong

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pemahaman yang lebih luas mengenai literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pada UMKM dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris untuk penelitian lanjutan, terutama terkait literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pada UMKM.